

Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20

Ilham Daeng Makkelo

Universitas Hasanuddin, Makassar
ilhamdaengmakkelo@gmail.com

Abstract

The focus of this paper concerns the idea of a dream as a modern city, especially in Makassar. Started since the beginning of the 20th century, when the cities in Indonesia are in a vortex that blends with the development of global modernity. Even to some extent, the practice is more than what is shown or is happening in the West. The dream of a modern city is knit by one successive regime, always trying to present and translate the spirit of modernity of every age. However, urban planning as one of the aspects of the modern city, on the one hand, gives birth to a reality beyond the plans that have prepared. On the other hand creates irony with the many imbalances or contradictions. In Makassar, urban planning can never be consistently implemented due to diverse constraints. Urban planning cannot survive as a sustainable policy. Each ruling regime has a city plan that is often inconsistent with continuing previous planning. Subsequent policies tend to be partial and not comprehensive.

Keywords: dream, modern city, colonial, postcolonial, Makassar

Pendahuluan

Hindia Belanda adalah tempat yang memikat untuk dipelajari, karena wilayah itu tampaknya ada serentak di wilayah-wilayah jangkauan modernitas paling jauh dan dekat dengan pusatnya yang paling dinamis.
(Rudolf Mrazek, *Engineers of Happy Land*, 2006: xiv-xv)

Rudolf Mrazek mencitrakan bahwa sejak awal abad ke-20, wilayah Indonesia berada dalam keterhubungan dengan perkembangan kemodernan yang berlangsung di belahan dunia lainnya, yang sampai taraf tertentu, prakteknya mampu memperlihatkan ekspresi tersendiri.¹ Kota-kota di Indonesia yang letaknya nun jauh dari pusat penyebaran ide-ide kemodernan, menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek pengalaman kemodernan. Namun demikian perjalanan kota-kota itu sepanjang abad ke-20 harus dilihat secara berimbang serta mengungkapkan keunikan lokalnya. Kota-kota Indonesia bukanlah semata obyek tak bereaksi atas pengaruh dari luar, bisa jadi kota-kota itu dan warga kotanya justru aktif dalam proses “dialektika” antara apa yang lama dan apa yang baru, serta apa yang “lokal” dan apa yang dari luar, khususnya dalam proses modernisasi dan pencarian makna modernitas.

Menjelang abad ke-20, Makassar² merupakan salah satu kota di Hindia yang dalam waktu panjang telah mengalami pengalaman dengan kebaruan Barat. Seperti yang disebutkan dalam catatan seorang pengunjung di akhir abad ke-19:

“Makassar adalah titik pusat bagi penyebaran hasil-hasil kebudayaan Barat ke daerah timur yang terbelakang, dan merupakan salah satu pusat perdagangan pribumi di kepulauan itu. Rotan dari Kalimantan, kayu manis, dan sarang lebah dari Flores dan Timor, Tripang dari teluk Carpentaria (Australia), minyak kayu putih dari Buru, bunga pala liar dan kulit kayu *mussoi* dari New Guinea – kesemuanya ini dapat diperoleh di toko Cina dan Bugis di Makassar, bersama dengan beras dan kopi yang merupakan hasil-hasil utama dari daerah sekitarnya” (Forbes, 1996: 349). Di samping karena, Makassar sebagai kota pelabuhan

¹ Tokoh zending N. Graafland nampak terkejut ketika sampai di Minahasa yang digambarkannya berada di sudut bumi yang terjauh, mencermati kemajuan pesat dalam perkembangan peradabannya. Para kepala kampung tampil dengan berbagai simbol Barat, seperti pemandangan botol *jenever* atau koran-koran di atas meja. Lihat N. Graafland, *Minahasa: Negeri, Rakyat dan Budayanya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991).

² Makassar memiliki beberapa pengertian, di antaranya; Pengertian antropologis menunjuk kelompok etnis yang berdiam di sepanjang jazirah selatan pulau Sulawesi. Pengertian politik historis merupakan nama kerajaan yang diidentikkan dengan kerajaan Gowa – Tallo. Pengertian selat yakni laut yang memisahkan antara pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi. Pengertian kota, yakni kota yang terletak di tepi pantai selat Makassar bahagian selatan. Kajian ini akan melihat Makassar dalam pengertian kota, khususnya perkembangannya di Abad ke-20. Lihat Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011); Heather Sutherland, “Ethnicity, Wealth, and Power in Colonial Makassar: A Historiographical Reconsideration”, dalam Peter J.M. Nas (ed.), *The Indonesian City. Studies in Urban Development and Planning*. (Holland: Foris Publications, 1986); “Whose Makassar? Claiming Space in a Segmented City”. (*Jurnal Comparative Studies in Society and History*, 2011: 53 {4}), hlm. 791-826; G.K. Andi Lolo, “Dari Makassar ke Ujung Pandang”, (Ujung Pandang: Makalah, 1971).

utama sudah cukup dikenal hingga abad ke-19 (Poelinggomang, 2002).

Pada awal abad ke-20, Kota Makassar mengalami transformasi kemodernan yang sama terjadi di beberapa kota Indonesia, meski kota ini berada dalam wilayah *periphery*³ dari pemerintahan Belanda yang berpusat di Batavia. Ada dua indikator penting yang menandai hal tersebut, pertama; kebijakan pemerintahan langsung melalui pegawai bangsa Belanda (Vlekke, 1943: 328; Koerts, 2001), dan kedua; penetapan Makassar sebagai salah satu kota otonom di tahun 1906 (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*: 1906, No. 171; Kerchman, 1930). Makna dari kebijakan tersebut adalah hak untuk membuat peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rumah tangga daerahnya. Dengan demikian, inilah saatnya era baru adanya kewenangan yang dimiliki sebuah pemerintahan kota, yang tidak pernah ada pada masa sebelumnya.

Beranjak dari realitas awal abad ke-20 itulah, maka tulisan ini akan melihat bagaimana transformasi kota Makassar menjadi kota modern sepanjang abad ke-20. Pentingnya abad ini karena sering diidentifikasi sebagai era dimana meluasnya kemodernan di Indonesia. Konsep utama yang dipergunakan adalah modernitas, yang dalam tulisan ini bermakna waktu (zaman baru), dan epistemis (kesadaran baru). Modernitas berarti “pengalaman” melalui upaya terus menerus untuk perbaikan kehidupan, mencapai kemajuan, atau menyikapi kondisi dan proses modernisasi.⁴ Seperti yang disinyalir Georg Simmel atas modernitas dan perkotaan, bahwa modernisasi memberikan keuntungan dalam kehidupan, pengaruh uang terhadap masyarakat modern, yang dapat dijelaskan pada pengalaman waktu, ruang dan hubungan sebab akibat (Simmel, 1978; Ritzer & Goodman, 2011, terj: 550-551). Dalam perkembangannya kehidupan modern adalah sebuah “dunia yang tak terkendali” dengan langkah, cakupan, dan kedalaman perubahannya. Modernitas tidak mengambil jalan tunggal, bukan satu bagian, tetapi terdiri dari sejumlah bagian berlawanan dan saling bertentangan, dan lebih dikenal dengan konsekuensi modernitas (Giddens, 1990).

Tulisan ini akan menelusuri modernitas dalam tiga aspek yang dianggap sebagai satu kesatuan proses modernisasi, terutama dalam kasus kota-kota di Indonesia. *Pertama* yaitu produksi ruang modern, dimana modernitas secara mudah dilihat dengan teknologi, penataan perkotaan, atau lingkungan fisik kota. *Kedua* adalah ekspresi dan respons yang direpresentasikan oleh individu atau masyarakat yang berhubungan dengan ruang-ruang modern. Representasi meletakkan perhatian utama pada visualitas dan tidak ada yang meragukan pentingnya tontonan dan tampilan di kota-kota modern, kesadaran diri untuk melihat dan terlihat bahwa warga kota

³ Pada masa kolonial, wilayah di luar Jawa sering diposisikan sebagai *periphery* (pinggiran). Daerah pinggiran itupun masih ada wilayah prioritas, misalnya Manado hingga akhir abad ke-19 dalam arti modernitas kolonial lebih maju dibanding Makassar. Namun, sejak permulaan abad ke-20, Makassar mampu menjadi kota alternatif selain Manado, dimana simbol-simbol kebaruan dapat diperoleh seperti halnya pendidikan modern. Pada aspek tertentu bahkan mengambil peran sentral, misalnya dalam hal organisasi pergerakan. Pada periode berikutnya, peran kota ini menjadi lebih penting.

⁴ Modernitas harus dicermati dengan konsep sejenis seperti modern, modernisasi, dan modernisme. *Modern* adalah suatu kondisi lahirnya ide atas suatu keinginan untuk mencapai kemajuan dan kebaruan, dan sering dikaitkan dengan gerak dari kondisi tradisional ke yang baru pada masanya masing-masing. *Modernisasi* yaitu proses perubahan atas berbagai bentuk dan cara pada perjalanan suatu proyek modern. Adapun *modernisme* adalah suatu bentuk pemahaman atas reaksi terhadap perubahan yang berhubungan dengan modernitas. Lihat Ilham Daeng Makkello, “Kota dalam Modernitas: Pengantar Tinjauan Konseptual dan Teoretis”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.1, No.1, 2014.

terhubung dengan lingkungan modern⁵. Ketiga, ironi atau kontradiksi yang mengiringi proses modernisasi. Relasi antara ruang kota dan masyarakat dalam konteks modernitas memperlihatkan sisi mengecewakan sepanjang waktu. Pada awalnya modernisme mungkin terlalu bersemangat diyakini kemampuannya untuk memecahkan masalah di masa depan. Kenyataannya, ketimpangan atau ironi modernitas terus bersanding dengan modernisasi itu, dan ruang kota adalah cerminan paling jelas akan hal tersebut. Ini mungkin tidak mengherankan jika mengikuti analisa Auguste Comte, yang menunjukkan salah satu ciri tatanan sosial modernitas adalah kecenderungan negatif yakni ‘berkembangnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial’⁶.

Modernitas Kolonial

Makassar sejak awal abad ke-20, berada dalam pusaran kemodernan *ala* Hindia Belanda. Gelombang modernisasi khas Barat mulai tampak pada paroh akhir abad ke-19 dan semakin masif perkembangannya pada awal abad ke-20. Pemukiman yang teratur dan bersih, listrik, *Societeit de Harmoni*, dansa, pasar malam, kanal-kanal, jalan beraspal, hotel, arsitektur *avant-garde*, kebersihan, hingga penataan kampung (*kampung verbetering*) adalah beberapa yang bisa dihubungkan dengan citra modern. Mewujudkannya adalah proses yang bisa jadi menggembirakan, mengharukan dan tidak jarang mengecewakan. Cerita keriuhan acara dansa di gedung kesenian atau membaca surat kabar dan mendengarkan radio⁷, bersanding dengan cerita keterbelakangan, diskriminasi dan ketidakberdayaan. Kampung⁸, jalan berlumpur, gelap, angker, dan kekerasan adalah cerita lain dibalik geliat dan mimpi modern itu. Ini bukan soal diskriminasi kolonial semata, bisa jadi dua realitas itu sesungguhnya adalah dialektika yang saling terhubung dimana makna modernitas itu bisa ditelusuri. Ketika orang-orang Belanda dan para priyayi di Jawa menikmati hedonitas benda-benda modern, di sudut kampung juga terbangun budaya pinggiran atau bahkan tandingan dengan ekspresi tersendiri (Kuntowijoto, 2004). Di Makassar, ketika pemerintah kota memerintah pada bagian tertentu di kota, maka di kampung-kampung perkotaan berjalan pemerintahan sendiri dan dengan ekspresi kehidupan tersendiri. Dalam skala lebih luas, nyata seperti yang dikatakan Nordholt bahwa karena konteks kolonialnya maka modernitas di Hindia bersifat kontradiktif (Nordholt, 2005: 25).

Selain simbol-simbol modern dan gaya hidup yang mudah direpresentasikan sebagai citra kemodernan, produksi ruang kota adalah satu bagian penting dimana makna modernitas itu bisa ditelusuri. Masa kolonial Belanda, memperlihatkan bahwa usaha menuju kota modern dimulai dengan penataan dan produksi ruang. Makassar setelah memiliki *Burgemeester* (walikota) di tahun 1918, mengeluarkan setidaknya dua kebijakan penting berkaitan penataan dan produksi ruang kota. Pertama adalah *Bouw en woonverordening voor de Gemeente Makassar* tahun 1918, memuat peraturan tentang izin bangunan. Kedua yaitu *Hinderordonantie* tahun 1926, yang

⁵ Bryan Turner, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 171; Adam B. Seligman, “Menuju Penafsiran Kembali Modernitas dalam Zaman Posmodernitas”, dalam Bryan Turner, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.212-216.

⁶ Piöter Sztompka, *Sztompka, Piöter, Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2011), hlm.82.

⁷ Surat kabar yang terbit di antaranya; *Suara Parindra*, *Pemandangan*, *Suara Umum*, *Berita Baru*, dan *Pemberita Makassar*. Di tahun 1924, ANETA (agen berita Hindia Belanda), siaran dari jam 6 pagi sampai 1 siang, dan frekuensinya diterima Kota Makassar. Radio menjadi jembatan modernitas, seperti tampak pada iklan radio Philips; “waar oost en West elkaar ontmoeten” (dimana timur dan barat bertemu).

⁸ Kampung kota masa Hindia Belanda memiliki kondisi yang mirip. Gambaran pemukiman penduduk “asli” ini dilukiskan oleh salah seorang penulis Belanda di tahun 1917 dalam sifat-sifat negatif modern, “tempat-tempat yang penuh dengan gubug dari bambu, papan kayu, dan gedeg, dengan daun jendela tetapi tidak ada jendelanya, tanpa lantai selain tanah, tak ada kamar mandi, tempat mencuci, dan tak ada WC”.

mengatur tentang aktivitas perdagangan dan industri, terutama yang memerlukan izin khusus. Kedua aturan tersebut mendorong ekspansi yang cepat atas penggunaan ruang kota, ditandai dengan dibangunnya sarana prasarana fisik perkotaan, antara lain jalan, perkantoran, hotel, tempat hiburan, pusat bisnis, dan lain-lain. Termasuk sarana transportasi modern yang menghubungkan Kota Makassar dengan wilayah sekitarnya, seperti jalur kereta api Makassar - Takalar sepanjang 46 kilometer yang dibuka tahun 1922 (McTaggart, 1976:76,80).

Seiring berbagai kebijakan pemerintah kota, mendorong beragam fasilitas modern pada kota kolonial dibangun. Penyediaan air bersih dibangun tahun 1923, dan selanjutnya terbit “Peraturan Pasar” yang mengatur bangunan, pemakaian dan pengawasan pasar-pasar milik Kotapradja Makassar⁹. Untuk pekerjaan perumahan, walikota pertama Everwijn Dambrink mendirikan Perseroan Terbatas “Perumahan Rakjat di Makassar”¹⁰. Di bagian lain, kemajuan sarana pendidikan cukup signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya (Sarkawi, 1997; Salmon, 2010: 469; Wibowo, 2000).

Hingga tahun 1930-an, Kota Makassar telah menjelma sebagai kota modern dan kosmopolitan¹¹, dengan segala fasilitas yang menjadikan kota ini sebagai bagian dari sebuah jaringan komunikasi dan transportasi yang menghubungkannya dengan segala penjuru dunia. Sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut:

Di Pasarstraat yang selalu sibuk, ada setidaknya 3 toko pakaian besar; Hotchand Kemchand, Bombay Merah, dan Liberty. Di Tempelstraat dalam sebuah gedung indah ada toko pakaian dengan nama dalam bahasa Perancis “Au Bon Marche”, dan ada juga toko *Maison* “Femina”..... , ada *boerderij* “Frisia” di Goaweg yang menyediakan susu segar sapi Australia dan Belanda, juga *yoghurt* Bulgaria “asli”, dan mentega. Bila barang yang dijinjing dari toko sudah terlalu banyak, tersedia beberapa perusahaan taksi yang siap mengantar. Namun tidak sedikit penduduk yang lebih memilih untuk membeli sedan Italia, “Fiat”, tersedia pula sedan Amerika “Dodge”, termasuk yang paling besar dan mewah Dodge-Six

⁹ Kebijakan ini merupakan keputusan Dewan Kota pada 7 Juli 1925 (*Javasche Courant* 21/8/1925, No.67). Dalam peraturan ini pengelolaan pasar dikelola oleh panitia pasar, yang dikepalai oleh pemimpin pasar (*marktmeester*). *Marktmeester* berada di bawah walikota, dan secara khusus dibantu oleh Panitia Pasar. Penggunaan tempat dalam pasar diatur oleh Panitia Pasar dan dikenakan tarif sewa yang tiap tahun ditetapkan Walikota. Pemakai tempat memiliki kartu langganan (*abonnementsbaart*). Petugas pasar terdiri atas bagian pengawasan, ketertiban, dan kebersihan pasar, pengatur tempat jualan, dan penanggungjawab cukai. Dalam menjalankan tugasnya mereka memakai tanda yang ditetapkan oleh Walikota. *Marktmeester* tiap hari menyeter cukai yang diterimanya pada kas kotapradja. Lebih lanjut lihat *Arsip Celebes, Reg. No. 5* (Makassar: Kantor Perpustakaan dan Arsip Wilayah Sulawesi Selatan).

¹⁰ Perseroan direncanakan berjalan selama 75 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Lihat *Javasche Courant*, 25 Nopember 1927, No.94; *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg.No.9*. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2004).

¹¹ Kosmopolitan adalah kondisi dimana suatu tempat atau masyarakat memiliki keterhubungan atau jaringan dengan tempat lain di berbagai belahan dunia. Citra kosmopolitan dibangun oleh keberagaman yang berasal dari berbagai tempat, sehingga lahir pendirian bahwa setiap orang adalah warga dunia (*international-minded*). Aspek globalisasi penting sebagai sarana terbentuknya identitas masyarakat kosmopolitan. Solidaritas etnis dan bangsa mengecil dan memberi ruang pada solidaritas lintas negara, yang mendorong lahirnya integrasi budaya dari populasi yang berbeda. Multikulturalisme berkembang dibarengi individualisme yang mengedepankan prinsip-prinsip universal. Lihat “Cosmopolitan City!”, *Jurnal Economic and Political Weekly*, Vol. 7, No. 46/47 (Nov. 18, 1972), pp. 2275+2277; Pramod Talgeri, “Globalisation and Cosmopolitan Identities”, *Jurnal Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. 89 (2008), pp. 169-179; *Encyclopaedia of the Social Sciences*, (New York: The Macmillan Company, 1951), hlm. 457-461.

“De Luxe”, semua bisa dipesan langsung melalui telepon dengan pedagang mobil H.P Lienhardt, juga di Pasarstraat. Hadir juga 9 konsulat negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Portugal, dan Cina. Kota Makassar di tahun 1930-an sudah dilayani dengan fasilitas kota yang baik. Makassar sudah dibanggakan sebagai “kota yang paling diterangi di Hindia Belanda”. Listrik seperti juga gas dilayani oleh perusahaan swasta, dan terdapat 4.342 pelanggan listrik di Makassar yang menggunakan 4,7 juta kilowatt tenaga listrik (Pradadimara, 2004: 184-186).

Transformasi kemodernan tetap berlangsung pada masa pendudukan Jepang. Kehadiran tentara Kekaisaran sejak tahun 1942 di kota Makassar memang tidak dalam waktu lama, tapi ikut menentukan pengelolaan kota pada waktu selanjutnya. Pada masa inilah untuk pertama kalinya pelibatan orang-orang Indonesia pada posisi penting dalam administrasi pemerintahan. Penataan lembaga pendidikan dilakukan, penerbitan surat kabar, penggantian nama jalan, atau sekedar tetap membuka bioskop dan hotel. Satu yang mencolok masa ini adalah pembukaan toko serba ada, yang bisa jadi pertama kalinya di kota Makassar¹².

Pasca-Kemerdekaan dan Impian Modernitas

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pengaturan kota Makassar justru kembali lagi dalam campur tangan Belanda. Ini semakin diperkuat sejak terbentuknya negara federal bentukan Belanda yakni Negara Indonesia Timur (NIT). Terbentuknya NIT memperkuat kedudukan kota Makassar karena menjadi ibukota negara federal itu. Berbagai fasilitas sebagai ibukota negara dibangun termasuk fasilitas pendukungnya, seperti gedung parlemen dan kementerian, termasuk pula kembali tumbuhnya kebutuhan akan hotel dan penginapan¹³.

Beberapa kebijakan penting pada periode NIT yang menandai penataan dan pengaturan kota adalah; *pertama*, penetapan Presiden NIT tentang pembentukan kota yang memuat ketentuan tentang pembangunan dan penatan sebuah kota¹⁴. Semangat kebijakan ini yakni sebuah kota berotonomi penuh, dengan fasilitas pemukiman yang memungkinkannya menjadi modern di masa-masa mendatang. Di tahun 1947 pula *Stadsgemeente* Makassar membicarakan rencana tata kota Makassar (*Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 37, 2004*). Kementerian Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum Kota Makassar (*Verkeer en Waterstaat Plaatselijke Opbouwdienst Makassar*) menyusun dan membicarakan tentang perluasan pembangunan kota Makassar (*Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 35, 2004*). Selanjutnya di akhir tahun 1948, Kementerian Lalu Lintas dan Perairan NIT menyusun tata pembentukan

¹² Aktivitas pendidikan diatur oleh *Selebes Minseibu Bunkyoikatyo*, surat kabar di antaranya *Selebes Simbun* dan *Pewarto Selebes*. Nama jalan diganti; *Staat Spoor Weg* menjadi *Koonan Doori*, *Goaweg* menjadi *Koto Doori*. Fasilitas kota yang lain tetap berfungsi, misalnya Bioskop Sientje, *Societeit de Harmoni*, dan Hotel Empress. Toko serba ada seperti Kaneko.

¹³ Di Hooge Pad terletak hotel paling bergensi yaitu Grand Hotel. Di depannya penggemar rokok luar negeri dapat membeli merek: *555, Pall Mall, Camel, Lucky Strike, Capstad, Chesterfields*, atau *Marlboro*. Hotel penting lain adalah Hotel Wijnands yang terletak di perempatan Jalan Amanagappa dan Jalan Sultan Hasanuddin. Di Jalan Bulusaraung depan Bioskop Sirene tahun 1947 terdapat dua buah *bar*. Adanya kebutuhan hotel dan penginapan ditandai dengan permohonan izin pendirian. Berdiri Hotel “Kian An” di Jalan Timor No.34, Hotel Ping Ping di Jalan Bawarkaraeng No.54, Hwa Seng Hotel *Societeit Straat No. 35*, dan pembukaan kembali Ngo Oh Hotel yang telah dibuka sejak zaman Belanda, dan ditutup pada zaman Jepang. Lihat *Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 21*. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2004).

¹⁴ Pembentukan ibukota NIT termuat dalam *Staatsblad IT. 1948/34*. Lihat dalam Hanock Luhukay, *Dari Makassar Ke Ujung Pandang. Beberapa Catatan Perubahan Ketatanegaraan, Tata Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Sebuah Kota Besar*. (Manuskrip tidak diterbitkan, tanpa tahun), hlm. 269.

kota dan juga rencana penataan jalan dan lalu lintas sepanjang perairan Kota Makassar (*Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 41, 2004*).

Produksi ruang, teknologi, gaya hidup adalah panggung modernitas kota itu dimulai. Dari titik inilah modernitas khas perkotaan Indonesia, termasuk Kota Makassar bisa dijelaskan. Apa arti atau makna modern tentu tidak mudah diungkapkan, bahkan sekedar untuk digeneralisasi. Bagaimana semua itu dimaknai sebagai pengalaman modernitas, tidak hanya sekedar menyebut cara yang baru, karenanya perlu ditelusuri lebih lanjut. Disebabkan pengertian “modern” terkadang mudah diartikan sebagai “Barat” semata. Selain menggali dinamika dan makna kemodernan yang berkembang masa kolonial, maknanya bisa dicari ketika terjadi perubahan rezim ke era pascakolonial. Lalu apa yang terjadi dengan kota kolonial modern peninggalan Belanda. Benarkah alam “kemerdekaan” yang diterjemahkan bebas, lepas, menjauh, atau tidak terikat dengan penjajah (Barat) tampak pada impian kota modern pascakolonial.

Tahun 1949 merupakan tahun kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Tapi untuk Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar justru memasuki babak masa-masa ketidaktenangan akibat berbagai perlawanan kepada pemerintah pusat¹⁵. Jika perhatian pemerintah tersita untuk meredam kekacauan yang terjadi, maka penduduk kota tetap bergelut menghadapi tantangan kehidupan perkotaan. Tidak banyak kemajuan fisik sepanjang tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an, namun bukan berarti geliat modernitas perkotaan tidak berjalan. Selalu saja ada cara modernitas mencari bentuknya, dan bertransformasi dalam kondisi apapun. Aktivitas politik bisa jadi cerminan terbangunnya tatanan lembaga politik modern di tingkat lokal dan ini menandai munculnya elit baru¹⁶. Di sektor perumahan misalnya, pemerintah kota memang tidak membangun perumahan secara besar-besaran, tapi terlibat dalam mengontrol pendirian bangunan dan rumah, melalui perizinan yang ketat¹⁷. Pada aspek lain, ada kebijakan memodernkan pasar-pasar kotapradja¹⁸.

Ekspresi gaya hidup modern merupakan tanda penting masa-masa kekacauan ini. Untuk situasi tertentu, kota-kota Indonesia dan juga kota Makassar bisa dikatakan berada dalam suasana “menolak kolonialisme tetapi membayangkan barat”. Misalnya pada kemeriahan menonton film di bioskop, yang merupakan hiburan paling diminati warga kota, namun jika memperhatikan film-film yang ditayangkan hampir semuanya adalah film Barat (Makkelo, 2011). Ekspresi gaya hidup warga kota juga memperlihatkan kecenderungan baru, seperti kebiasaan berkumpul dan berkendara keliling kota, memotong rambut di *barbershop*, perayaan ulang tahun, pesta dansa, dan lainnya. Seperti yang ditulis Nasaruddin Koro berikut ini:

¹⁵ Beberapa perlawanan dan pemberontakan yaitu dimulai oleh “Peristiwa Andi Azis”, yang terbesar dan terlama adalah Pemberontakan Kahhar Musakkar, lainnya adalah Perjuangan Semesta Alam (Permesta).

¹⁶ Sebagai perbandingan lihat Sita van Bemmelen dan Remco Raben, *Antara Daerah dan Negara. Indonesia tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2011).

¹⁷ Lebih detail lihat bundel pengajuan izin bangunan di Kota Makassar tahun 1950-an pada *Arsip Kota Makassar. Reg. No. 31* (Makassar: Kantor Perpustakaan dan Arsip Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan). Aturan ini berlaku untuk pendirian rumah, toko, atau bangunan apapun di perkotaan baik itu bangunan permanen, semi permanen ataupun yang tidak permanen. Prosedur izin bangunan harus pula memiliki lampiran gambar sketsa rumah yang diajukan, dengan ketentuan memiliki kakus, sumur, dan memperhatikan letak bangunan dari jalan dan peta lokasi.

¹⁸ Tahun 1951 diadakan perbaikan Pasar *Tjidu* di Jalan Beruaging dengan lods-lods pasar yang tertata rapi. Penataan memperhatikan lingkungan sekitar pasar tersebut yang bersih dan teratur. Pada denah pasar, terdapat 18 bangsal yang masing-masing terdiri 14 petak, 4 bangsal yang masing-masing terdiri dari 5 petak, dan 1 bangsal yang terdiri dari 8 petak. Kompleks pasar ini dilengkapi dengan 10 kakus, 1 sumur, dan 2 tempat mencuci atau mandi. Kemudian disediakan tempat khusus untuk penghentian kendaraan.

Bioskop tersebar dimana-mana. Film James Dean, Elvis Presley seperti *Rebel without a cause*, *Giant*, dan *GI Blues* dipadati penonton. Jaket merah menirukan James Dean laris manis. Wabah *cross boys* tidak ketinggalan. Di beberapa ruas jalan tertulis di atas aspal a.l. *Parumbu Boys*... ulang tahun para remaja dari kalangan tertentu biasanya berpesta dansa dalam irama *calypso*, *cha-cha*, *rock and roll* dan *boogie woogie*, dalam suatu atraksi diiringi lagu, *Rock around the clock* (Bill Haley), *kiss me quick* dan *Diana*. Langu berganti, langkah *steps* berubah *jive*... dalam gerakan seru serta aplaus... *sheba...heba*... (Koro, 2009: 44-45).

Di sisi yang lain berkembang pula kesenian rakyat atau orkes-orkes termasuk rombongan orkes tiup di kampung-kampung yang menamakan dirinya “tukang musik beroep”, juga seni suara “sinrili” dengan iringan kesok-kesok (rebab) adalah merupakan seni kegemaran segenap lapisan masyarakat¹⁹. Kebiasaan ini memberi dorongan tumbuhnya orkes-orkes keroncong dan langgam Melayu di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu orkes langgam Hawaii sangat digemari golongan elit, baik untuk *oplustering* pada pesta-pesta, maupun untuk pengiring dansa. Menurut daftar Djawatan Radio di kota Makassar tercatat sekitar 25 buah orkes keroncong, 7 buah orkes daerah, 6 orkes langgam Melayu, 5 orkes seruling bambu, dan 8 orkes langgam Hawaii. Aktif pula berbagai organisasi seni dan budaya, sebutlah misalnya Gelanggang Kesusasteraan, TIFA, SEHATI, Pertip, *Toneel Vereniging*, Lesfira “Raja” Lekra, Mekar, Tjenderawasih, dan lain-lain. Dan sejak tahun 1955, diadakan “Festival Seni Drama Indonesia” di Kota Makassar (Nai, dkk, 1956: 88-91).

Ruang kota tetap menjadi bagian penting dimana modernitas dipertontonkan dan dirayakan. Perairan pantai Losari dan sekitarnya adalah ruang penting modernitas perkotaan tahun 1950-an. Pantai Losari mulai berfungsi sebagai ruang terbuka utama yang paling banyak dikunjungi warga kota untuk bersantai dan rekreasi. Di sana juga ada markas Persatuan Olahraga Ski Air (POPSA), yang di tempat tersebut sering dilaksanakan berbagai kegiatan maritim seperti perlombaan perahu tradisional dan sebagainya. Sekitarnya menjadi pusat pertokoan modern, dimana impian barat dihadirkan; studio foto, pabrik es, serta toko-toko penjual es krim yang menyediakan produk negeri kincir angin jenis *candies*, *hopjes*, *cokelat van houten*, dan *volle melk* yang akrab dengan lidah orang kota (Koro, 2009: 28-31, 34, 56).

Modernitas terbangun dari pertemuan antara yang baru dan yang lama, atau dari yang lokal dan dari luar. Ini pula yang tergambar dalam ruang Kota Makassar tahun 1950-an. Muncul rumah makan *ikan bakar* “Empang” sebagai perintis “restaurant” ikan bakar di Makassar. Makanan khas seperti *coto*, tampil di ruang-ruang modern perkotaan, misalnya *coto Mulo* yang terkenal di dekat gedung MULO di tahun 1952. Tahun 1960-an muncul *coto Daeng Sangkala* di Bioskop Plaza. Modernitas lokal di sektor yang lain yakni berkembangnya istilah-istilah baru seperti *bajingan tattara* atau bandit tulen di tempat-tempat ramai dan pasar. Transformasi modernitas ditemui toko-toko Tionghoa, disamping menjual barang kelontong juga merupakan kedai kopi dan teh disertai kue khas setempat; *buroncong*, *jalangkote*, *apang paranggi*, atau *pisang epe*. Istilah khas kebiasaan baru anak muda karena kebiasaan berboncengan bergerombol keliling kota sambil piknik di antaranya *allei* atau *arrakada*. Adapun istilah seperti; *ana ugi*, *mareja*

¹⁹ Kelompok orkes-orkes ini mempergunakan alat-alat seperti gong dengan variasi besar kecil, gendang dalam bermacam bentuk dan ukuran, ganrang bulo (gendang yang dibuat dari bambu), rebana, kesok-kesok (rebab), siter atau kecapi, pui-pui (seruling) yang dimainkan secara instrumental atau untuk mengiringi nyanyian lagu-lagu daerah.

reja, anging mammiri mengemuka sejak diadakan kontes *baju bodo*.²⁰

Dari sisi kebijakan penataan kota, terlihat usaha-usaha pemerintah kota untuk melakukan pengaturan sarana kota. Di tahun 1958, dikeluarkan aturan lalu lintas satu arah di beberapa ruas jalan (*Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/2/1959, No.12*). Kemudian revisi atas beberapa peraturan perkotaan dan juga penarikan pajak kota di tahun 1959 (*Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 21/4/1959, No.32*). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menetapkan pula perubahan Peraturan Pasar (*Paserverordering*) kota Makassar (*Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/2/1959, No.12*). Kebijakan yang lebih nyata adalah dibentuknya Dinas Pembersihan Kota (*Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 12/8/1960, No.65*).

Orde Baru: Ketidakjelasan Rencana Tata Kota dan Ironi Kota Modern

Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966, memberi nuansa tersendiri atas transformasi modernitas di perkotaan. Bentuk dan perwujudannya mengikuti tuntutan zaman dan dialektika dengan ide-ide kemajuan yang berkembang. Jika pada masa sebelumnya pemerintah kota tidak mampu mewujudkan banyak bangunan baru dan penataan fisik. Di masa ini, Kota Makassar memperlihatkan “rasa” modernnya dalam pembangunan fisik kota, meskipun modernitas dan Orde Baru tidak mudah untuk diterjemahkan dalam produksi ruang kota semata. Menurut Abidin Kusno, kata-kata seperti “modern” tidak mudah dipahami, karena bukankah Orde yang menamakan dirinya ‘baru’ itu sudah modern. Pengertian seperti “modern” atau “modernitas” telah dijajah atau dibekukan oleh politik penguasa (Kusno, 2012: xii). Namun perhatian atas perkembangan ruang kota dan dinamika masyarakat pendukungnya akan menjadi salah satu kunci bagaimana modernitas itu dipahami dan dimaknai.

Digerakkan oleh seorang walikota bernama H.M. Dg Patompo²¹, beragam proyek-proyek modern berusaha diwujudkan di Kota Makassar. Begitu terpilih sebagai walikota menjelang Orde Baru di tahun 1965, menetapkan rencana “Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Makassar 1965-1970” yang lebih terkenal sebagai Program Pemberantasan 3-K (kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan). Tujuan utama program ini adalah capaian kebutuhan hidup dalam 6 hal yakni: cukup lapangan kerja, cukup perumahan, cukup air minum/listrik, cukup pendidikan/kesehatan, cukup perhubungan, cukup hiburan/olahraga. Program 3 K dianggap sebagai peletakan fundamental untuk tahap pembangunan selanjutnya. Sasaran jangka panjang yaitu menjadikan kota Makassar sebagai kota lima dimensi yaitu: kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademi, kota pariwisata (*Makassar Bulletin*, 1971; Patompo, 1976: 27).

²⁰ *Allel* artinya milikmu kalau melihat temannya sedang bersepeda beriringan dengan gadis lain. Bahasa gaul lainnya khususnya bagi pria dengan pria adalah *arrakada*, istilah yang sering terdengar ketika sekelompok anak lelaki ketika saling berpapasan.

²¹ H.M. Dg Patompo dianggap sebagai walikota fenomenal dalam sejarah Kota Makassar. Menjabat walikota sejak 1965 hingga menjelang 1980, dan berhasil membangun banyak proyek-proyek penting yang dikenang dalam jangka lama. Cara kerjanya mirip seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin di Jakarta, makanya dia sering digelari sebagai Ali Sadikin ke-2, tapi dia sendiri justru menggelari Ali Sadikin sebagai Patompo ke-2. Walikota ini cukup flamboyan layaknya Presiden Soekarno, terkenal menyukai maket yang mengambil bentuk tiga dimensi dan mempunyai kualitas pemanggungan (*staging*) saat dipajangkan. “Panggung” mengingatkan orang pada Soekarno yang berdiri di “podium” dan memberi pidato. Begitupun Patompo, dialah Walikota yang di kantornya dipenuhi dengan alat-alat peraga dan termasuk maket pengembangan kota, dan selalu dipertontonkan ketika ada tamu pemerintah. Tabiatnya masih kental dengan semangat revolusi dengan impian terwujudnya masyarakat sosialis Makassar. Dia menyatakan dirinya “sosialis demokrat”.

Proyek modern pertama yakni perumahan “Ujung Pandang Baru”²² atau dikenal juga dengan “Ujung Pandang Plan” direncanakan sebagai kota satelit “in miniatur” yang mulai dibangun medio 1965, di pinggiran kota bagian timur. Ujung Pandang Baru dirancang dengan fasilitas yang lengkap; sarana kesehatan, rumah ibadah, sekolah, sarana olahraga, bioskop, dan areal untuk pasar-pasar, termasuk kantor layanan pemerintahan. Jika sebelumnya, kawasan ini merupakan desa yang berawa-rawa dan sangat jarang penduduknya maka kini benar-benar sudah merupakan suatu kota baru (Patompo, 1976: 32-33). Selain itu, jalan-jalan dan taman-taman dibangun menyatu. Dan juga terhubung dengan kantor PTT, polisi, pemadam api, gedung kesenian, pompa bensin, dan lain-lain. Proyek awal ini sesungguhnya sebagai contoh pemukiman yang modern, yang akan menjadi pilihan warga kota miskin yang sebelumnya tinggal di perkampungan yang tidak terurus. Namun hingga waktu yang lama, tempat itu tidak pernah benar-benar menjadi tempat tinggal warga kurang mampu di perkotaan.

Bersamaan dengan proyek “Ujung Pandang Baru”, dikerjakan pula suatu proyek jalan yang cukup monumental yakni “Makassar by pass”. Jalan yang langsung menghubungkan daerah pelabuhan dengan jalan keluar kota, membelah lingkungan yang dicadangkan untuk industri di utara dan timur. Lebar jalan dibuat 40 meter, dengan jalan lalu lintas cepat dan lalu lintas lambat diadakan pemisah, termasuk adanya jalur pejalan kaki, sedangkan bangunan yang akan berdiri di sepanjang jalan ini paling kurang jaraknya dari bahu jalan 20 meter (Husain dkk, 1966: 61). Konsep jalan yang terkoneksi antara berbagai bagian kota juga dikerjakan yakni jalan lingkar (*ring road*)²³.

Kondisi perkampungan yang tidak terurus, dengan lorong-lorong yang sempit yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan, dan keamanan berusaha diperbaiki dengan “Gerakan Masuk Kampung (GMK)”. Gerakan ini adalah usaha peningkatan dan perbaikan hidup penduduk yang ada di kampung-kampung, di lorong-lorong serta tempat-tempat yang terpencil dari fasilitas hidup yang ada di kota. Kegiatan ini merupakan impian Patompo atas kampung-kampung setelah kunjungannya ke kota London, seperti yang dilihatnya pada penataan perkampungan kumuh (*slum area*) kota-kota di Inggris. Rehabilitasi kampung berhasil menyulap lingkungan Maricaya Selatang, Mamajang Luar dan Dalam, Gaddong, Parang dan Wajo Baru, Pisang Selatan, Lariang Bangngi, Pattingalloang, Malimongan Baru, Pannambungang, dan Sambungjawa. Puncaknya adalah penataan besar-besaran di wilayah kampung kumuh di wilayah Lette, yang wilayah ini kemudian hari bernama “Kompleks Patompo” hingga sekarang (Mattaliu & Andhy Pallawa, 1997: 61-62). Untuk menanggulangi banjir pada perkampungan di selatan kota, maka di tahun 1965 dibangun tanggul besar di Kecamatan Mariso, untuk membendung air sungai Jeneberang yang meluap setiap tahun dan mengakibatkan banjir pada perkampungan. Tanggul penting ini kemudian dikenal dengan “Tanggul Patompo” (Patompo, 1976: 31).

²² Ujung Pandang Baru menyerupai proyek perumahan satelit awal di Jakarta, yakni Kebayoran Baru. Kata “Baru” ditambahkan dalam nama Ujung Pandang yang mengindikasikan suatu identifikasi atas kebaruan sebuah cara hidup dalam bermukim. Tempat tinggal dan berbagai sarana serta kebutuhan hidup lainnya dijadikan menyatu dalam satu kawasan perumahan. Jalanan yang menghubungkan antara rumah ke rumah dan antara rumah-rumah dengan tempat-tempat kegiatan sosial ekonomi lainnya telah dibangun secara permanen, jalan yang dilengkapi selokan dilengkapi dengan lampu-lampu neon yang cukup terang di waktu malam.

²³ Jalan lingkar (*ring road*) meliputi: *outer ring road* bagian barat menghubungkan jalan R.E. Martadinata-Ujungpandang-Pasar Ikan-Rajawali-Cenderawasih. *Inner ring road* meliputi jalan Slamet Riyadi- Sultan Hasanuddin-Arif Rate-Cenderawasih. *Middle ring road* meliputi jalan H.O.S. Cokroaminoto-Jenderal Sudirman-Dr. Sam Ratulangi. *Inner ring road* lainnya adalah jalan Bandang-S.Jeneberang-Kumala. *Outer ring road* bagian timur adalah jalan Andi Pangerang Petta Rani dan jalan Syekh Yusuf tembus ke PLTU Tello Baru. Jalan penghubung lainnya yang dibangun adalah jalan Hertasning dan jalan Emmy Saelan.

Perbaikan, peremajaan, pemasangan, pendirian, dan pembangunan merupakan istilah yang kerap muncul pada berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah kota. Di bidang kesehatan, didirikan rumah sakit umum pembantu di pinggiran kota, termasuk balai pengobatan dan BKIA di setiap kecamatan. Untuk mempercantik kota, dipasang lampu-lampu hias, memperbanyak lampu jalan atau neonisasi, dengan harapan disamping menambah keindahan kota, merupakan pula rekreasi gratis bagi masyarakat yang selama ini telah mengurung diri dalam kegelapan malam. Di beberapa bagian kota yang strategis, telah didirikan beberapa jam kota. Fasilitas lain yang mendapat sentuhan modernisasi adalah pelelangan ikan yang diimpikan termmodern di Asia Tenggara, menata pasar-pasar kampung, dan pemodernan stasiun bis antar kota (*Makassar Bulletin*, 1971: 6-7). Pembangunan lainnya adalah memodernkan gedung-gedung sekolah secara bertingkat²⁴, penyediaan sarana hiburan dan jasa lainnya²⁵, termasuk proyek-proyek INPRES²⁶. Berbagai usaha penataan dan produksi ruang kota, sesungguhnya demi impian akan kota modern dan teratur, seperti yang tercermin dalam kutipan berikut:

Kota Makassar tahun 1970an. Pematja berdjalan sepanjang hari sepanjang malam dalam kota dari arah daerah pelabuhan ke Matjini, sebelah timur djalan Sunu dan dari Paotere langsung ke Ujung Mariso, lalu berputar ke timur dan seterusnya. Pematja akan tertjengang melihat pemandangan2 tamasja kota jang indah. Pematja akan melihat rumah2 rakjat jang teratur, sehat, bersih, berlantai semen, atap genting, punja kamar2 mandi dan WC jang bersih, punja pekarangan2 jang sehat ditumbuhi rumput hidjau dengan pagar2 tumbuhan2 jang dipotong rapi. Nampak pula di pekarangan rumah2 rakjat itu anak2 bermain2 jang berpakaian bersih-bersih, berbadan sehat2, gembira ria. Pematja berdjalan terus. Pematja menikmati djalan2 raja jang litjin dan bersih, tidak berdebu, tidak berlobang sedikitpun. Pematja menengadah menjaksikan gedung2 jang bertingkat, jang letaknya teratur rapi dan bersih, gedung *guest house* Makassar jang dikonstruksikan menurut arsitektur modern, gedung2 kantor dagang dan perusahaan2 daerah, gedung bank kota, kompleks pasar sentral jang ramai dan bersih. ... Selanjutnya pada hari raja, pematja mengadjak anak-isteri pwmatja berdjalan2 keliling kota. Mungkin pematja asjik memperhatikan gedung2 indah jang teratur rapi tetapi anak-isteri pematja memaksa pematja mampir di sebuah taman jang indah, suatu *park* jang ditumbuhi rumput hidjau jang senantiasa dipotong rapi ditengah2nja kebun2 kembang, air mantjur dan bangku2 tempat duduk, kolam ikan serta djalan2 berbentuk lingkaran jang diaspal dengan rapi dan

²⁴ Gedung-gedung sekolah dimodernkan dengan dibangun secara bertingkat. Karena keterbatasan keuangan pemerintah kota, maka diselenggarakan sumber keuangan yang mendatangkan pro-kontra yakni penyelenggaraan undian berhadiah jenis *lotere*, atau dikenal dengan *Lotto* Makassar sejak tahun 1969 hingga 1972.

²⁵ Sarana hiburan di antaranya; THR (Taman Hiburan Rakyat), pemandian Pulau Kayangan, pacuan kuda Jongaya, *golf court* di Gombara dan Panakkukang, serta beroperasi sedikitnya 22 bioskop. Obyek-obyek turisme; museum Benteng Ujung Pandang, taman anggrek, pelabuhan perahu Paotere, makam pahlawan Diponegoro, serta *handy craf & shooping centre*. Jasa penerbangan; Garuda Indonesian Airways, Merpati Nusantara Airlines, Pelita Air Service, Bouraq. Jasa travel di antaranya; Nitour, Pacto, Irama Suka, Tunas, Maktour, Usaha Express, dan lain-lain. Hotel berstandar internasional antara lain; Hotel Raodah, Hotel Zed, Hotel Grand, Hotel Victoria, Tanjung House, Passangrahan Makassar, Sulawesi Beach Internasional.

²⁶ Tahun 1970 diluncurkan program INPRES (Instruksi Presiden Republik Indonesia), No.1/1970 tentang bantuan pembangunan untuk kabupaten/kotamadya sebanyak Rp.50 perkapita, dan bantuan ini mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain itu terdapat 7 macam Inpres yang diterima Kota Makassar yakni: 1) Pembangunan gedung SD, pompa air dan sumur, 2) rehabilitasi gedung SD, 3) pembangunan gedung puskesmas dan biaya operasionalnya, 4) rehabilitasi gedung Puskesmas, 5) pembangunan jamban keluarga, 6) bantuan obat-obatan, 7) bantuan pembangunan daerah tingkat II. Lihat H.M. Dg. Patompo, *Rahasia...*, *Opcit.* hlm. 60-61.

litjin. Alangkah sedjuk perasaan pembatja ketika itu karena disana-sini tumbuh pohon2 jang rindang tempat berteduh (Husain dkk., 1966: 68-70).

Tahun 1970-an menjadi titik tolak tersendiri produksi ruang kota untuk mewujudkan impian kota modern, yang dimulai dengan perluasan kota pada tahun 1971 menjadi 215 km² atau 7 kali lipat dari kota yang lama²⁷. Perluasan kota ini memungkinkan pembangunan kota yang lebih leluasa pada masa-masa selanjutnya. Dicanangkan sebuah proyek besar yang disebut “Proyek Panakkukang/ Panakkukang Plan” atau “Panakkukang Garden City”. Proyek yang diproyeksikan untuk menggeser pusat kota dari lokasi kota lama ke wilayah Panakkukang. Pekerjaannya oleh sebuah perusahaan swasta, PT Timurama (Forbes, 1996: 374). Pusat perkantoran pemerintah yang baru dibangun, dan terutama suatu pemukiman yang luas direncanakan, yang dari peta bagan maupun rencana perumahan, mirip dengan Kebayoran Baru di Jakarta. Memiliki jalan-jalan lingkar, taman-taman, dan kesan ruang yang lapang. Proyek Panakkukang mencerminkan konsepsi kota yang mempunyai ruang terbuka dengan kepadatan yang rendah. Dua nilai yang maknanya hampir hilang seiring bertambahnya waktu.

Pada tahap selanjutnya, dalam Panakkukang Plan sebagai master plan kota telah ditetapkan kawasan (*site plan*) yaitu: kawasan industri, kawasan pemerintahan, kawasan rekreasi, kawasan perdagangan, kawasan pariwisata, dan kawasan perwismaan. Semua itu akan merupakan sebuah *garden city* seluas 4.000 ha. Wilayah Panakkukang direncanakan akan dibangun dengan 2 fungsi yaitu: *pertama* sebagai pusat pelayanan aktivitas perkotaan; perkantoran, perdagangan, perbelanjaan, kebudayaan, dan rekreasi. Kedua, sebagai tempat kediaman utama baik bagi golongan yang berpenghasilan rendah, menengah maupun tinggi. istilah *boulevard* sebagai jalan untuk fungsi *land mark* kota juga bermula dari proyek ini (Patompo, 1976: 36-37). Terkait peranan kota sebagai pusat industri, rasanya Makassar tidak pernah benar-benar menjadi kota industri, dimana perkembangan dan kemajuan kota ditopang oleh industri-industri besar²⁸. Konsep perumahan rakyat lainnya yang perlu disinggung adalah program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan proyek Perumnas (Perumahan Nasional).

Pembangunan perkotaan memperlihatkan hasilnya menjelang tahun 1980-an, yang ditandai sarana dan fasilitas perkotaan sudah semakin baik. Konsentrasi pusat-pusat perekonomian telah berkembang, salah satunya adalah “Pusat Pertokoan Sombaopu” yang diresmikan tahun 1970. Kebutuhan yang meningkat di dekat laut, menyebabkan sepanjang pantai berdiri pertokoan, bar, restoran, dan klub malam²⁹. Namun derap modernisasi yang digenjot sejak awal Orde Baru,

²⁷ Perluasan kota ini termuat dalam P.P. No. 51 Tahun 1971. Kabupaten yang berbatasan bersedia menyerahkan beberapa wilayahnya. Kabupaten Gowa menyerahkan: Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tello Baru, Antang, Tamangapa, Jongaya, Maccini Sombala, dan Mangasa. Kabupaten Maros menyerahkan: Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng, dan Sudiang. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyerahkan: Barrang Caddi, Barrang Lompo, dan Perjuangan/ Kodingareng. Lihat *Dokumen Perluasan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan Perubahan Nama Kota Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang*. (Ujung Pandang: Bagian Hukum Kodya Dati II Ujung Pandang, 1999).

²⁸ Garis pemisah antara “industri” dan “pelayanan komersil” sulit ditentukan pada kota ini. Beberapa aktivitas yang terdaftar sebagai “industri”, kenyataannya merupakan beberapa bentuk dari pelayanan kwasi-eceran. Industri yang dikemukakan disini sebagian besar berorientasi lokal. Misalnya pabrik sari buah markisa, atau industri tenunan sarung tradisional. Lebih lanjut lihat W. Donald McTaggart, *Opcit.* hlm. 86. Lihat pula D.G. Wilke, “Paradoks Urbanisasi di Dunia Ketiga” (PRISMA No.7, Desember 1972), hlm.49.

²⁹ Sarana pendidikan, kesehatan dan jasa di antaranya; Taman Kanak-Kanak 81 buah, SD Negeri 168 buah, SD Swasta 52 buah, SMP Negeri 18 buah, SMP Swasta 49 buah, SMA Negeri 19 buah, SMA Swasta 41 buah, Universitas dan Akademi sebanyak 30 buah. Puskesmas 14 buah, Rumah Sakit Bersalin 33 buah, serta paling kurang ada 20 Bank yang beroperasi. Lihat *Kotamadya Ujung Pandang dalam Angka 1979*, (Ujung Pandang: Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang, 1979), hlm. 24-46, 47-50.

sangat berhubungan dengan tingkat kemampuan Kota Makassar memenuhi tuntutan yang ada. Modernitas tidak saja soal fisik kota ataupun gaya hidup yang dianggap modern, namun terkait pula dengan permasalahan-permasalahan sosial. Apalagi, Makassar memiliki ciri suatu kota yang melampaui kemampuannya untuk menyediakan pekerjaan produktif bagi penduduk baru. Hal ini nyata pada perumahan kampung yang tetap merupakan ciri menonjol dalam pemandangan dan isu kota modern sepanjang waktu. McTaggart memberi komentar; “para migran membangun wilayah pemukiman miskin yang luas dan perumahan setengah liar di sekeliling kota, menempati tanah-tanah kosong yang mereka temukan. Jasa dan pelayanan yang memenuhi standar memadai tidak tersedia bagi daerah pinggiran kota yang tumbuh dengan pesat. Kota Makassar tetap mewarisi perumahan yang tidak memadai, komunikasi yang tidak lancar, dan sistem pelayanan umum yang tidak efektif” (McTaggart, 1976: 76-77).

Pada sisi yang lain, ketimpangan dalam ruang perkotaan dan ruang sosial semakin tampak. Salah satunya adalah sektor (ekonomi) informal yang berkembang seiring dilaksanakannya modernisasi di perkotaan. Pemerintahan kota menekankan kebijakannya pada modernitas; jalan diperlebar, pasar dibangun, pengembangan direncanakan sampai pinggiran, dan perluasan bentuk hiburan yang lebih liberal. Diperkirakan sektor informal hampir tidak mempunyai peranan dalam kerangka yang besar seperti itu, karena sektor ini dianggap mengganggu panorama modern. Namun dalam kenyataannya, bahwa ciri penting sektor informal adalah bagian terintegrasi dalam kehidupan kota termasuk dalam proyek modern. Ini tergambar dalam penelitian Forbes yang menjelaskan peran sektor informal di tiga lingkungan berbeda di Makassar sepanjang tahun 1970-an (Forbes, 1976: 348, 367-368, 353-354, 370-371). Terlihat jelas bagaimana sektor informal tidak pernah hilang dan menjadi bagian dari transformasi kemodernan dan produksi ruang kota. Misalnya transportasi becak yang semakin menentukan dalam mobilitas ketika tumbuhnya kelas menengah kota, Perlu dicatat, beberapa pelayanan sektor informal lebih cocok untuk kaum kaya daripada kaum miskin lantaran ongkosnya yang relatif tinggi. Keliru untuk memandang bahwa sektor informal hanya melayani kaum miskin kota. Sektor ini merupakan ciri menonjol dalam pemandangan kota modern di Indonesia karena menyebar di mana-mana dan menjadi pusat perhatian. Satu lagi yang mengemuka sejak pembangunan digalakkan adalah persoalan pengangguran di kota. Di Makassar soal pengangguran sudah mulai disinggung pasca sensus penduduk tahun 1961. Menurut Jones dan Bondan Supraptilah setelah tahun 1970-an, pengangguran semakin meningkat dan tertinggi di kalangan orang muda dan usia kerja (Jones & Bondan Supraptilah, 1996: 293-317). Pada taraf tertentu melahirkan gelandangan di perkotaan (Alkotsar, 1980).

Menjelang era tahun 1980-an, “pembangunan” adalah kata sakti modernisasi pemerintahan Orde Baru, yang salah satu artinya adalah “gedung”. Pembangunan menyebar dengan cepat dari akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, ketika gedung pemerintah yang besar-besar dibangun di setiap ibukota provinsi. Memanfaatkan beton secara bebas, berkat monopoli semen nasional yang dimiliki oleh kroni penguasa. Sejumlah besar uang dari bantuan internasional ditambah dengan penerimaan negara digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ini (Vickers, 2011: 283). Jika modernisme rasa sosialis³⁰ masih mengemuka pada masa Walikota H.M. Dg Patompo, maka pada periode selanjutnya beralih ke modernisme pasar ala Soeharto. Sejak tahun 1980-an,

³⁰ Abidin Kusno menyatakan bahwa dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno pada 1966, modernisme sosialis karakter Indonesia dinyatakan gagal dan tidak berlaku lagi. Namun di masa pemerintahan Patompo masih kental dengan impian masyarakat sosialis. Tergambar dalam pidato-pidatonya atau judul dan muatan buku yang diterbitkannya. Seperti tergambar dalam buku Peringatan 60 Tahun Kotamadya Makassar yang diberinya judul “Makassar Menuju Sosialisme Pantjasila”.

kekuatan pasar ada di balik pembangunan, yang digarap bersama-sama oleh negara dan pemilik modal. Kombinasi dana investasi luar negeri dan dana kapitalis domestik membuahkan ruang-ruang baru di dalam dan luar kota. Di ruang kota, jika di Jakarta lahirlah Bumi Serpong Damai. Target utama adalah “kelas menengah yang ingin hidup di lingkungan baru dengan gaya hidup baru” (Kusno, 2012: 99). Di Makassar, lahir Panakkukang Plan, dan disusul dengan berdirinya pemukiman-pemukiman modern lainnya, dengan tawaran gaya hidup yang baru mengikuti tren nasional bahkan global.

Jika impian pemodernan kota yang dilakukan H.M. Dg Patomo di awal Orde Baru adalah modernisasi kota secara menyeluruh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari aspek keterbelakangan perkotaan. Maka paling tidak di dua dekade penghujung abad ke-20, trend kemodernan dengan tujuan untuk mendefinisikan identitas kelas, maka disadari atau tidak, yang dilawan akhirnya adalah kelas bawah yang tersingkir dari kota modern. Kondisi ini yang terus berlanjut hingga masa reformasi dan seterusnya. Banyak yang bangga akan kemodernan Kota Makassar, tapi kadang soal fisik semata yang juga belum tentu memberi rasa nyaman dan keadilan. Namun di sisi yang lain, ironi sebagai konsekuensi modernitas juga semakin menampakkan wujudnya. Meminjam ungkapan pesimis Wilke berikut ini:

Kota modern boleh dibilang tidak mungkin memenuhi kebutuhan rakyat seluruhnya, ia tidak dapat menyediakan tempat-tempat yang dapat dihuni oleh manusia, ia tak mungkin menawarkan segala pekerjaan, perumahan, alat pengangkutan serta berbagai fasilitas, jasa dan kenyamanan lainnya. Kota modern bahkan telah merosot dan memberi fungsi-fungsi jasa untuk kepentingan ekonomi sektor modern saja. Dan akibatnya adalah pembangunan yang kacau, yang tidak wajar bagi peri-kemanusiaan” (Wilke, 1972:51).

Modernitas, sepertinya ditakdirkan untuk setia mengikuti ide-ide kemajuan dan kebaruan itu. Meski ironi dan dampak buruk menyertainya, namun transformasinya berlangsung, modernitas rasanya gerak sejarah itu sendiri. Derap pembangunan terus menggeliat begitu dekade 1980-an dimulai. Suatu rencana yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan penduduk kota soal sarana rekreasi, tamasya, olahraga, dan lain-lain. Sebuah impian baru dicanangkan dengan rencana pembangunan “Taman Impian Tanjung Bunga” Ujung Pandang. Dengan meniru beberapa aspek Taman Impian Jaya Ancol, dan beberapa tempat rekreasi lainnya di Indonesia, seperti Pantai Kuta di Bali, Prapat di Sumatera, walaupun dalam wujud yang lebih kecil. Dibangun di kawasan delta Sungai Jeneberang, dataran yang dianggap tanah negara, walaupun di sekitarnya terhampar empang dan tanah yang dikuasai penduduk lokal. Impian pemerintah kota dengan proyek ini adalah mewujudkan kota Makassar menjadi kota “anging mammiri” di era yang lebih modern, seperti yang tertulis di proposal pembangunannya:

[D]i belakang kawasan Tanjung Bunga terpancang suatu pemandangan yang sangat indah, seindah pantai di Honolulu dan Waikiki, yaitu pantai Losari dengan pohon nyiurnya yang selalu melambai dengan bangunan-bangunan indah sepanjang jalan Somba Opu dan Penghibur. Rumah jabatan Walikota, Passangrahan Makassar, Rumah Sakit Stella Maris dengan jelas dapat dilihat. Lalu lintas mobil, motor, becak, dan pejalan kaki, nampak dengan jelas. Dengan berdiri di kawasan Tanjung Bunga, baru nampak dengan jelas bahwa kota Ujung Pandang adalah benar kota Anging Mammiri (Dinas Pariwisata Kotamadya Ujung Pandang, 1979: 1-3, 8).

Rencana pembangunan lima tahunan yang disusun tahun 1984, menekankan berbagai aspek kehidupan warganya yang ditata berdasarkan wilayah pemukimannya. Untuk wilayah pusat kota diperuntukkan sebagai: 1) pusat kegiatan perdagangan, 2) terminal jasa distribusi bagi sirkulasi perdagangan regional, 3) kawasan perumahan padat yang sangat terbatas dibanding kebutuhan. Untuk wilayah tengah kota, diperuntukkan: 1) sebagai wilayah perumahan, 2) kegiatan perdagangan bersifat eceran, 3) keseluruhan kawasan perumahan dibagi menurut jenjang serta dilengkapi dengan fasilitas sosial yang dibutuhkan. Untuk wilayah pinggiran kota diperuntukkan: 1) sebagai *industrial estate*, kampus, kompleks perumahan, Perumnas, dan sebagainya, 2) merupakan titik peralihan antara transportasi dalam kota dan luar kota (Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, 1984: 2-3). Namun pijakan dan rencana ini rupanya tidak diterapkan secara konsisten dalam pengembangan kota. Aturan pemerintah kota ini akhirnya takluk oleh modal besar yang menggerakkan dan berkepentingan pada penggunaan dan produksi ruang kota. Sebagaimana kata Adrian Vickers:

Dekade 1980-an adalah periode yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Bertepatan dengan berakhirnya Perang Dingin, pemerintah Indonesia menyatakan liberalisasi ekonomi, disertai dengan kebijakan resmi liberalisme sosial yang disebut „keterbukaan“. Hukum yang membatasi investasi asing, termasuk pembelian tanah, telah diubah untuk membolehkan aliran modal lebih bebas, dan tiba-tiba negeri ini dibanjiri uang, ketika hotel bintang lima menjamur di Bali dan gedung-gedung pencakar langit Jakarta berjumlah tiga kali lipat dalam semalam. Kemakmuran yang diakibatkan oleh ledakan ekonomi tersebut mewujud dalam budaya konsumen baru, pusat-pusat perbelanjaan tersebar di seluruh Nusantara. Mereka yang sangat miskin dicegat di depan pintu oleh petugas keamanan yang selalu waspada, tetapi kelas menengah baru dan bahkan para pekerja miskin „terhormat“ diperbolehkan masuk. Saat malam minggu, para mahasiswa dan para wanita muda yang bekerja di pabrik-pabrik garmen bisa berkeliaran di mal, mendengarkan music pop Barat dan Indonesia, atau melihat-lihat produk waralaba internasional seperti *Ralph Lauren* atau *body shop*. Orang Indonesia yang tak mampu membeli barang-barang asing mahal mengumpulkan uang mereka untuk membeli imitasinya sehingga mereka bisa menjaga penampilan untuk berpartisipasi dalam gaya hidup konsumtif. Para pria muda menabung demi kencana penting mereka dengan membawa pacarnya ke *McDonald*” (Vickers, 2011: 305-306).

Makassar menjelang tahun 1990-an, berada dalam suasana seperti yang digambarkan Vickers di atas. Impian “Taman Tanjung Bunga” tidak bertahan lama, karena segera lokasi itu dan sekitarnya diambil alih oleh korporasi besar seperti Lippo Group untuk membangun kota satelit baru yang kemudian terkenal dengan kawasan GMTDC (Gowa Makassar Tourism Development Corporation). Dengan mengelola tanah sekitar 1.000 ha beragam fasilitas modern dibangun dari tempat wisata, *mall*, perumahan kelas atas, dan lain-lain. Di tempat lain hotel berbintang semakin banyak, dan privatisasi ruang-ruang publik sudah menjadi kecenderungan tersendiri. Rumah toko (*ruko*) menjadi penampilan paling mencolok ruang kota. *Ruko* yang tidak memperhatikan estetika arsitektural dan kesehatan lingkungannya. Jauh melenceng dari fungsi dan impian *ruko* yang multifungsi dan sarat keindahan, layaknya bangunan *art deco* tahun 1930-an dan 1940-an. Semuanya segera dibungkus dalam cengkeraman kata sakti “Globalisasi” yang serasa begitu dekat dalam ruang dan percakapan warga kota. Rumah-rumah bertampang *Disney* yang makin berkembang sejak tahun 1998, menawarkan fantasi

ketenangan di tengah iklim ketidakpastian dan gelombang kecemasan. Semakin banyak berdiri perumahan khas *gated community* (Usman, 2011: 1-4), dengan model kluster terpagar dan dijaga keamanan siang dan malam.

Kesimpulan

Kota Makassar berada dalam pusaran dan transformasi kemodernan dalam sejarah Indonesia sepanjang abad ke-20. Di awal abad ke-20 hingga akhir kolonial Belanda, modernitas bukanlah sesuatu yang dapat dihapuskan dari Indonesia karena ia sangat berkaitan dengan kehadiran Belanda. Ide perancangan kota sangat dipengaruhi oleh rencana tata kota yang berlaku di Eropa. Kemudian diiringi dengan berkembangnya institusi kemodernan seperti lembaga pendidikan, serta berdirinya organisasi politik maupun sosial sebagai wujud bentuk pergerakan kebangsaan. Kondisi ini berpengaruh pada lahirnya masyarakat modern dengan segala simbol kemajuannya. Selanjutnya, antara tahun 1942 dan 1945 masyarakat Indonesia menyaksikan demam seragam yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai akibat rezim militer dan upayanya untuk menggerakkan dukungan massa. Masa Jepang yang singkat ini memberi warna tersendiri dengan pelibatan tokoh lokal dalam pemerintahan Kota Makassar. Kemudian modernitas mewujudkan diri dengan lebih lantang pada akhir 1940-an dan sepanjang 1950-an. Masyarakat pada tahun 1950-an memilih keroncong atau musik Barat. Makassar meski berada dalam kondisi politik yang tidak stabil, warga kota tetap berada dalam “kemeriahan” dengan kecenderungan gaya hidup Barat, seperti menonton film-film Amerika atau Eropa.

Pada masa Orde Baru, keseragaman monumental dengan metropolis yang terdiri atas jalan raya disertai bangunan perkantoran yang dicirikan oleh arsitektur berteknologi tinggi. Masyarakat pendukungnya hidup di dalam batas-batas yang dideskripsikan memasukkan kombinasi baru ruang privat dan ruang publik-privat, “menyisihkan” masyarakat miskin dan bahkan mengabaikan keberadaan mereka. Kondisi ini terjadi disebabkan inkonsistensi pelaksanaan perencanaan kota yang telah disusun. Selain itu, perencanaan selalu kalah oleh kepentingan pragmatis kekuatan modal. Kesenambungan perencanaan kota dari satu rezim ke rezim selanjutnya hampir tidak terjadi. Karenanya, Kota Makassar hingga akhir abad ke-20 memperlihatkan ambiguitas modernitas, seperti umumnya kota-kota Indonesia lainnya. Struktur gedung-gedung kontemporer memberi nuansa yang menarik pada kawasan tertentu, namun bentuk kota masih didominasi oleh lanskap model dualistik, yaitu antara bentuk tradisional dan modern, formal dan informal, serta kaya maupun miskin.

Dalam realitas historisnya, modernitas di Kota Makassar tidak memperlihatkan bentuk yang tunggal, tetapi justru memperlihatkan wajah beragam. Wujud maupun perubahannya berlangsung pada satu fase tertentu maupun pada periode yang berbeda. Terutama pada tiga aspek utama yang saling terkait yakni ruang fisik kota, manusia dan masyarakat modern, serta ironi atau persoalan masyarakat perkotaan yang muncul sebagai akibat proses modernisasi. Modernitas sebagai pengalaman sejarah diperoleh melalui proyek-proyek modern yang nyata, serta dalam imaji dan impian. Imajinasi kota modern pada kasus tertentu kadang hanya pada taraf perencanaan dan tidak terwujud sebagaimana harusnya. Begitupun mimpi-mimpi manusia modern seringkali sulit diwujudkan atau dirasakan. Pada konteks modernitas perkotaan, imaji atau impian adalah bagian dari “pengalaman” modernitas itu sendiri. Berdasar jejak (pengalaman) historis menunjukkan bahwa Kota Makassar pada abad ke-20 sudah menjadi kota modern. Sejak awal abad ke-20, modernisasi digalakkan dan terus berlangsung melintasi periode sejarah hingga akhir abad ke-20, dengan motivasi, bentuk, dan latar belakang yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen:

- Arsip Celebes, Reg. No. 5*, (Makassar: Kantor Perpustakaan dan Arsip Wilayah Sulawesi Selatan).
- Dinas Pariwisata Kotamadya Ujung Pandang, “Rencana Pembangunan Delta Tanjung Bunga Kotamadya Ujung Pandang” Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, 1979.
- Dokumen Perluasan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dan Perubahan Nama Kota Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang*. (Ujung Pandang: Bagian Hukum Kodya Dati II Ujung Pandang, 1999).
- Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, Reg. No. 9, 21, 31, 35, 37, 41*. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2004).
- Javasche Courant* tanggal 21 Agustus 1925 No. 67; tanggal 25 Nopember 1927 No.94.
- Kotamadya Ujung Pandang dalam Angka 1979*, (Ujung Pandang: Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang, 1979), hlm. 24-46, 47-50.
- Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, “Rancangan Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang 1984/1985 – 1988/1989”.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*: 1906, No. 171; *Staatsblad It.* 1948/34.
- Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 10/2/1959, No.12; tanggal 21/4/1959, No.32; tanggal 10/2/1959, No.12; tanggal 12/8/1960, No.65.*

Buku dan Artikel:

- “Cosmopolitan City!”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 7, No. 46/47 (Nov.18, 1972).
- Alkotsar, Artidjo, *Insan Kesepian dalam Keramaian. Telaah tentang Gelandangan di Ujung Pandang*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1980).
- Bemmelen, Sita van dan Remco Raben, *Antara Daerah dan Negara. Indonesia tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2011).
- Encyclopaedia of the Social Sciences*, (New York: The Macmillan Company, 1951).
- Forbes, A. *Insulinde, Experiences of a Naturalist's Wife in the Eastern Archipelago* (Edinburgh: Blackwood, 1887).
- Forbes, Dean, “Penjaja di Ujung Pandang”, dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi,

- Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996).
- Graafland, N., *Minahasa: Negeri, Rakyat dan Budayanya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991).
- Giddens, Anthony, *The Consequences of Modernity*. (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1990)
- Husain, A. dkk., *Makassar Menuju Sosialisme Pantjasila. 60 Tahun Kotamadya Makassar.* (Makassar: Pemerintah Kotamadya Makassar, 1966).
- Husain, Sarkawi B., *Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar 1876-1942.* (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 1997).
- Ilham, "Refusing Colonialism, Watching Western Films in the City of Makassar in the 1950s", (Kyoto: Proceeding ITP Internatinal Symposium "New Horizon of the Interdisciplinary Approach to Asian and African Area Studies", 2011).
- Jones, Gavin dan Bondan Supraptilah, "'Underutilization" Tenaga Kerja di Palembang dan Ujung Pandang". Dalam Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996).
- Kerchman (ed.), *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930*, (Weltevreden: Gedrukt bij G. Kolff & Co., 1930).
- Koerts, H.J., "Amentar BB di Sulawesi Selatan", dalam S.L. van der Wal (peny.), *Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001).
- Koro, Nasaruddin, *Makassar Terkenang Masa Lalu.* (Jakarta: Mitracard Grafika, 2009).
- Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi, dan Kawula.* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004).
- Kusno, Abidin, *Zaman Baru Generasi Modernis. Sebuah Catatan Arsitektur.* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
- Lolo, G.K. Andi, "Dari Makassar ke Ujung Pandang", (Ujung Pandang: Makalah, 1971).
- Luhukay, Hanock, *Dari Makassar Ke Ujung Pandang. Beberapa Catatan Perobahan Ketatanegaraan, Tata Pemerintahan dan Kehidupan Sosial Sebuah Kota Besar.* (Manuskrip tidak diterbitkan, tanpa tahun).
- Makassar Bulletin*, (Makassar: Humas KMM, No.1, Th. 1971).
- Makkelo, Ilham Daeng, "Menolak Kolonialisme, Membayangkan Barat. Menonton Film di Bioskop di Kota Makassar Tahun 1950-an". *Prosiding Seminar.* Kyoto Universtity, 2011.
- Makkelo, Ilham Daeng, "Kota dalam Modernitas: Pengantar Tinjauan Konseptual dan Teoretis", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.1, No.1, 2014.
- Mattaliu, Abdurrazaq dan Andhy pallawa, *H.M. Dg. Patompo. Biografi Perjuangan.* (Ujung Pandang: Yayasan Pembangunan Indonesia, 1997).
- Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).
- McTaggart, W. Donald, "Kebijaksanaan Pembangunan Kota di Indonesia. Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan", (*Masyarakat Indonesia*, Tahun Ke-III, No. 1, 1976).
- Mrazek, Rudolf, *Engineers of Happy Land. Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Nai, Sikado Dg. dkk., *Buku Kenangan 50 Tahun Kota Besar Makassar*, (Makassar: Buku Kenangan, 1956).
- Nordholt, Henk Schulte, *Outward Appearance. Trend, Identitas, Kepentingan.* (Yogyakarta: LKiS dan KITLV Jakarta, 2005).

- Patompo, H.M. Dg., *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan. Fragmen Revolusi Pembangunan*. (Ujung Pandang, 1976).
- Poelinggomang, Edward L., *Makassar Abad XIX. Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. (Jakarta: KPG, 2002).
- Pradadimara, Dias, “Dari Makassar ke Makassar: Proses “Etnisasi” sebuah kota”, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Seligman, Adam B., “Menuju Penafsiran Kembali Modernitas dalam Zaman Posmodernitas”, dalam Bryan Turner, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Simmel, Georg, *The Philosophy of Money* (London: Routledge, 1978).
- Sutherland, Heather, “Ethnicity, Wealth, and Power in Colonial Makassar: A Historiographical Reconsideration”, dalam Peter J.M. Nas (ed.), *The Indonesian City. Studies in Urban Development and Planning*. (Holland: Foris Publications, 1986).
- Sutherland, Heather, “Whose Makassar? Claiming Space in a Segmented City”. *Comparative Studies in Society and History*, (4) 2011: 53.
- Sztompka, Piöter, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2011).
- Talgeri, Pramod, “Globalisation and Cosmopolitan Identities”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. 89 (2008), pp. 169-179.
- Turner, Bryan, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Usman, Sunyoto, “Gated Community.Space and social Inequality”. dalam Mark Woodward, et.al (ed.), *Indonesian Urban Cultures and Societies*. (Yogyakarta: Proceeding The 3rd International Graduate Students Conference on Indonesia, 2011).
- Vickers, Adrian, *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Insan Madani, 2011).
- Vlekke, Bernard H.M., *Nusantara; a History of the East Indian Archipelago*, (Massachussets: Harvard University Press, 1943).
- Wibowo, I., *Harga yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama kerjasama dengan Pusat Studi Cina, 2000).
- Wilke, D.G., “Paradoks Urbanisasi di Dunia Ketiga” (PRISMA No.7, Desember 1972).